

Abu Sayyaf Group in Southern Philippines after Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao

Abu Sayyaf Group di Filipina Selatan setelah Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao

Prakoso Permono
Universitas Indonesia

ABSTRAK

Filipina awal tahun 2019 diwarnai referendum di Filipina Selatan yang mengantarkan pada dibentuknya Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM). Konflik, instabilitas kawasan, dan perkembangan ancaman terorisme di Filipina Selatan khususnya dan umumnya di seluruh Filipina diharapkan berakhir dengan sebuah konsensus damai dan demokratis seiring terbentuknya pemerintahan transisi di BARMM. Harapan terciptanya perdamaian dengan keberadaan BARMM dalam tulisan ini dikaji secara spesifik dari salah satu kelompok teror yang berkembang di kawasan Filipina Selatan, Abu Sayyaf Group (ASG). Keberadaan ASG pada mulanya merupakan dampak kekecewaan usaha perjanjian damai yang diinisiasi pemerintah dan kelompok teror terbesar saat itu Moro National Liberation Front (MNLF), seiring dengan perkembangan waktu kelompok ASG bertransformasi menjadi sebuah kelompok kriminal dengan modus operandi penculikan dan permintaan tebusan, sekalipun tidak sepenuhnya meninggalkan posisi awalnya sebagai kelompok teror dengan kehendak separatis ideologis. Penelitian ini berusaha menjawab potensi dampak yang muncul pada ASG dengan dibentuknya BARMM di kawasan Filipina Selatan. Sayangnya opsi-opsi melemah dan bubarnya ASG yang disebabkan oleh keberadaan BARMM hanya dapat terjadi bila tercipta good governance dan penyelesaian persoalan dasar seperti kemiskinan dan potensi radikalisme yang terus berkembang. Jawaban dari masa depan ancaman teror ASG di Filipina Selatan akhirnya tergantung seberapa besar penguasaan wilayah, penegakan hukum, dan pengentasan kemiskinan di Filipina Selatan.

Kata-kata kunci: *Abu Sayyaf Group, Filipina Selatan, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.*

Early 2019 in the Philippines was marked by a referendum in Southern Philippines which led to establishment of Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM). Conflict, regional instability, and terrorism threats development especially in Southern Philippines and generally in all over Philippines are expected to end with a peaceful and democratic consensus as transitional government has formed already in the BARMM. The hope of creating peace with the presence of BARMM in this paper is specifically examined from one of terror group in the Southern Philippines region, the Abu Sayyaf Group (ASG). The existence of the ASG was initially a result of disappointment caused by peace agreement efforts initiated by Moro National Liberation Front (MNLF) the largest terror group at that time, along with its development the ASG Group transforming into a criminal group with kidnapping and ransom as their main modus operandi, but not completely abandoned its initial position as a ideological terror group with separatism agenda. This research seeks to address the potential impacts of BARMM establishment in the Southern Philippines region to the development of ASG Group. Unfortunately, the options to weaken and to liquidate ASG caused by the presence of BARMM can only occur if good governance is created and the basic problems such as poverty in the region are resolved. The answer to the future of ASG terror threat in the Southern Philippines ultimately depends on how much territorial control, law enforcement, and poverty alleviation process in the Southern Philippines.

Keywords: *Abu Sayyaf Group, Southern Philippines, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao.*

Konflik dengan corak insurgensi dan terorisme di Filipina Selatan adalah salah satu konflik terpanjang di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah Filipina sejak permulaan konflik dan terbentuknya Moro National Liberation Front (MNLF) dengan semangat memerdekakan Bangsa Moro di wilayah Sulu, Palawan, dan Mindanao telah berusaha untuk menemukan jalan keluar untuk mengakomodasi kepentingan aktor-aktor utama dalam konflik tersebut, tentunya dengan kedaulatan sebagai prinsip fundamental yang tidak dapat ditawar. Usaha pemerintah Filipina belakangan adalah referendum yang dilaksanakan pada awal tahun 2019 di Filipina Selatan. Referendum tersebut adalah dampak dari ditandatanganinya Bangsamoro Organic Law (BOL) oleh presiden Rodrigo Duterte sebagai usaha menciptakan perdamaian melalui pemberian otonomi khusus yang lebih luas dari Autonomous Region in Muslim Mindanao (ARMM) dengan nama Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM).

BARMM sebagai Usaha Perdamaian

Referendum di Filipina Selatan sebagai turunan dari Bangsamoro Organic Law (BOL) telah terlaksana pada 21 Januari 2019 lalu. Ditambah lagi referendum pada beberapa kota tambahan seperti Lanao del Norte dan North Catabato yang akan mengambil tempat pada 6 Februari 2019. Hasil akhir dari referendum tersebut berdasarkan pemberitaan yang dirilis oleh Reuters menunjukkan sejumlah 85% pemilih memilih menyetujui bergabung dan membentuk BARMM (Petty 2019). Artinya secara resmi dan legal pembentukan Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao telah mendapatkan kekuatan hukum berdasarkan sistem demokrasi yang terbuka dan diikuti oleh masyarakat luas di Filipina Selatan. Referendum dan Bangsamoro Organic Law (BOL) yang telah terlaksana diharapkan untuk membawa perdamaian di kawasan Filipina Selatan. Menarik bahwa referendum yang terlaksana didukung oleh *Moro Islamic Liberation Front* (MILF) partai politiknya United Bangsamoro Justice Party dengan turut mengawasi jalannya referendum. Hasil dari referendum untuk membentuk BARMM secara praktis membawa beberapa perubahan secara formal dalam pemerintahan, yaitu dengan membentuk sebuah komite *ad hoc* Bangsamoro Transition Authority (BTA) yang diketuai oleh pemimpin MILF Murad Ebrahim, dengan masa transisi 3 tahun sebelum pemilu dilaksanakan (Wersch 2019).

Menarik untuk melihat bahwa ARMM dan BARMM sebagai usaha mencapai perdamaian di Filipina Selatan mendapat dukungan dari baik MNLF maupun MILF. Keduanya dianggap sebagai organisasi dengan representasi terbesar dari Bangsa Moro di Filipina Selatan (Adam 2018). Kondisi ini secara sederhana seakan-akan memberikan kepastian bahwa perdamaian akan segera tercapai di Filipina Selatan, namun demikian penting bagi kita untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan komprehensif pada konflik kontemporer di kawasan tersebut, misalnya dengan banyaknya faksi dan kelompok teror lainnya yang berkembang dan beroperasi di kawasan yang sama maupun berdekatan. Apakah BARMM sebagai usaha perdamaian akan serta-merta diterima oleh seluruh faksi? MILF dan MNLF tentu tidak mewakili seluruh kelompok yang ada di kawasan tersebut, sekalipun berbagai literatur menjelaskan MNLF sebagai induk awal dari seluruh kelompok yang kemudian berkembang di Filipina Selatan. Kelompok teror yang berkembang di Filipina Selatan jelas tidak dapat dikatakan sebagai entitas tunggal baik dari sudut pandang tujuan, dasar ideologi, bahkan modus operandi (Panes 2016). Varian tujuan kelompok yang menggunakan instrumen terorisme untuk mencapai tujuannya pun cukup beragam

seperti usaha pendirian negara sendiri, kepentingan keuntungan finansial, ataupun murni kriminalitas. Pertanyaan yang tersisa dari kondisi faktual dan aktual ini ialah apakah referendum yang telah terjadi di Filipina Selatan sebagai jalan damai yang digadang-gadang pemerintah dan MILF serta MNLF tersebut akan membawa kedamaian dan berkurangnya ancaman terorisme di Filipina Selatan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya kita perlu memahami perspektif negara sebagai aktor penentu secara legal dan formal atas wilayah berdaulat negaranya.

Secara konkret, kebijakan pemerintahan Filipina hari ini di bawah pemerintahan Rodrigo R. Duterte membagi kelompok-kelompok yang dipaparkan di atas menjadi dua bagian. Bagian yang pertama disebut sebagai kelompok yang berkonflik dalam bentuk *internal armed conflict* dan kelompok lainnya disebut berkonflik dalam kerangka terorisme. Keberadaan NPA yang merupakan *onderbouw* Partai Komunis Filipina dan secara spesifik kelompok MNLF serta MILF yang disebut sebagai kelompok paling terorganisir dan terbesar akan masuk dalam rumpun kategori *internal armed conflict*. Sedangkan kelompok lainnya termasuk juga Abu Sayyaf Group (ASG) sekalipun merupakan anak kandung yang memisahkan diri dari MNLF dikategorikan sebagai kelompok teroris (National Security Policy 2017). Fakta di atas secara tidak langsung memberi jawaban bahwa BARMM sudah pasti tidak mengakomodasi dan tidak melibatkan kelompok teror seperti Abu Sayyaf Group yang akan menjadi studi dalam penelitian ini. Namun demikian, kebijakan pembentukan BARMM hasil referendum tentunya membawa pengaruh pada keadaan kawasan Filipina Selatan serta pergerakan dua kelompok besar MILF dan MNLF yang berbasis di wilayah yang beririsan dengan Abu Sayyaf Group. Oleh sebab itu, pertanyaan penelitian yang dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana BARMM dapat menjadi tantangan bubarinya kelompok Abu Sayyaf Group di Filipina Selatan?

Kerangka Teori

David Rapoport (dalam Schmid 2011) menyebutkan bahwa 90% kelompok teror hanya bertahan dalam kurun waktu tidak kurang dari 1 tahun, dengan 10 % sisanya dapat bertahan hingga 10 tahun. Riset Rapoport tersebut dipublikasikan pada tahun 1992. Studi tersebut kemudian dimutakhirkan oleh Jodi Vittori (2009) yang melakukan riset pada 100 kelompok teror yang tersisa 50 kelompok teror dengan rata-rata fase kehidupan selama empat tahun. Riset-riset tersebut dapat disempurnakan dengan beberapa poin hasil penelitian yang dipublikasikan Jones dan Libicki (2008) setahun sebelumnya pada 648 kelompok teror dengan kesimpulan bahwa kelompok teror dengan basis keagamaan seperti dalam gelombang keempat Rapoport memiliki potensi hidup lebih panjang dari kelompok teror dengan basis lainnya, kelompok dengan anggota kombatan) lebih dari 10.000 memiliki potensi untuk bertahan lebih lama ketimbang kelompok yang hanya memiliki anggota di bawah 1.000 orang. Sedangkan bila kelompok teror berubah atau mengakar pada tujuan separatis kecenderungan 50% kelompok teror berakhir dengan negosiasi bersama pemerintah, 25% berhasil mencapai tujuan pemisahan diri, dan 19% dikalahkan oleh kekuatan bersenjata.

Secara konseptual data dan asumsi yang telah dipaparkan di atas disandarkan oleh para peneliti pada beberapa konsep yang menggambarkan faktor berpengaruh dalam bubarinya kelompok teror. Weinberg dan Perlinger (2011) menjelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab bubarinya kelompok teror di antaranya tekanan represif

eksternal, kehancuran internal, penolakan publik, dan keberhasilan mencapai tujuan kelompok teror. Opsi paling akhir tentang keberhasilan kelompok teror dalam mencapai tujuan banyak dibantahkan oleh berbagai penelitian misalnya Harmon (2010) yang menyebutkan bahwa rata-rata kelompok teror yang berusia sekitar 15 tahun sebagian besar justru bubar dengan dikalahkan baik oleh pasukan keamanan seperti kepolisian, kalah dikarenakan lenyapnya kepemimpinan kelompok, atau kalah melalui kebijakan pemerintah yang baik dalam menangani akar-akar terorisme. Riset Harmon tersebut juga menggambarkan bahwa ketika kelompok teror bertahan hingga jangka waktu dekade maka arah bubarnya kelompok teror adalah tercapainya *limited gains*, seperti negosiasi yang menghasilkan kompromi.

Secara lebih spesifik dan praktis Cronin menjelaskan bubarnya kelompok teror dengan sebuah tabel luaran terhadap intervensi eksternal maupun kegagalan internal suatu kelompok teror, sebagai berikut:

Tabel 1
Intervensi Eksternal dan Kegagalan Internal Kelompok Teror

Fenomena	Frekuensi	Persentase
Penangkapan/pembunuhan pimpinan kelompok	71	30.6%
Tekanan otoritas pemerintah	51	21.9%
Meninggalkan terorisme dan memilih taktik lain	29	12.5%
Merger dengan kelompok teror lain	28	12.1%
Keberhasilan mencapai tujuan terorisme	18	7.7%
Kehilangan dukungan publik	10	4.3%
Konflik internal ideologi dan kekuasaan	8	3.4%
Kehilangan dukungan negara bagi <i>state-supported</i>	8	3.4%
Kegagalan regenerasi kelompok teror	6	2.5%
Kelompok teror memilih metode kekerasan lain	3	1.2%

Sumber: Cronin 2006. Kompilasi data oleh Weinberg dan Perlinger 2010.

Selain dari faktor-faktor yang telah dijelaskan oleh Cronin, Phillips (2011) memberikan sebuah asumsi tambahan faktor berpengaruh terhadap bubarnya kelompok teror. Faktor tersebut adalah dukungan dari lingkungan sekitar akar rumput. Dukungan akar rumput merupakan variabel yang juga mempengaruhi argumentasi Cronin dalam hal rekrutmen anggota, dukungan akar rumput merupakan faktor yang berpengaruh terhadap rekrutmen dan secara otomatis juga kepada aktivitas terorisme. Selanjutnya Phillips berargumentasi bahwa terdapat dua buah skenario keadaan dukungan akar rumput yaitu skenario kelompok teror dengan dukungan akar rumput yang rapuh akan mudah dikalahkan ketika pemerintah melakukan serangan ofensif, sedangkan skenario kedua pada kelompok teror membangun dukungan akar rumput berdasarkan serangan ofensif oleh pemerintah yang mengakibatkan korban dalam berbagai aspek. Maka pertimbangan untuk melakukan serangan ofensif terhadap kelompok teror dapat berakhir pada konsep *game theory*, yaitu posisi tidak pasti tergantung pada pihak akar rumput yang kondisinya tidak selalu dapat diprediksi (Phillips 2011).

Terdapat satu buah faktor lagi yang justru ditengarai merupakan salah satu faktor utama kekuatan sebuah kelompok teror yang sifatnya kelompok dan terorganisir.

Faktor tersebut adalah faktor finansial dan sumber daya. Tak dapat dipungkiri bahwa kelompok teror tidak akan mungkin beroperasi tanpa keberadaan dukungan finansial dan sumber daya, khususnya yang bersifat teknis dan taktis. Pendanaan dan sumber daya menjadi masalah utama dalam keberlangsungan kelompok teror. Vittori (2009) menjelaskan sebuah konsep otonomi, yaitu keberadaan donor yang mendanai dan memasok kekuatan sumber daya maupun finansial bagi kelompok teror. Keberadaan donor yang semakin kuat dari luar membuat kelompok teror amat bergantung pada tujuan dan target donor, dengan berubahnya atau dieliminasinya donor maka kelompok teror akan berangsur berakhir. Dengan kata lain sifat independen dan kemampuan mandiri adalah salah satu kunci bertahannya kelompok teror. Konsep ini juga mirip pada konsep *asymmetrical interdependence* dalam hubungan internasional, donor yang kuat akan memiliki nilai tawar lebih berdasar *nature* saling membutuhkan yang asimetris.

Posisi pendanaan dan sumber daya tersebut kemudian berpengaruh pada kapasitas atau kemampuan serangan sebuah kelompok teror. Vittori juga menambahkan pembagian kemampuan serangan kelompok teror pada empat tahap. Tahapan amat rendah ditandai dengan serangan properti dengan korban jiwa kecil tidak disengaja, tahap rendah ditandai dengan 50 korban atau kurang dalam sekali serangan, menengah dengan 50 atau lebih korban dengan terencana ditambah dengan orang asing sipil, tingkat tinggi ditandai dengan lebih dari 150 orang korban dalam sekali serangan yang dilakukan secara terencana ditambah dengan target korban yang dilindungi (Vittori 2009). Konsep-konsep tersebut adalah konsep yang akan dipakai dalam menjelaskan dan melakukan prediksi ilmiah terhadap potensi bubarnya (ASG) setelah BARMM di Filipina Selatan.

ABU SAYYAF GROUP (ASG)

Kelompok Abu Sayyaf Group (ASG) adalah salah satu kelompok teror yang berkembang di kawasan Filipina Selatan. Secara historis kelompok ASG terbentuk pada tahun 1991 sebagai reaksi pada posisi MNLF yang mengambil jalan negosiasi damai dengan otoritas Filipina akan perjuangan Bangsa Moro merdeka dengan dasar kebangsaan dan sosialisme Islamnya. Reaksi ASG adalah reaksi yang sama seperti yang diambil oleh MILF pimpinan Nur Misuari yang memisahkan diri dari induk kelompok teror di Filipina. Sejak saat tersebut hingga hari ini ASG merupakan kelompok teror terkecil di Filipina, namun demikian kemampuan dan ancaman yang disebabkan oleh kelompok teror ini jelas perlu dipertimbangkan hingga mendapatkan predikat sebagai kelompok paling radikal di antara kelompok teror Filipina lainnya (Counter-extremism Project 2019). Tujuan kelompok teror ini sebagaimana pula latar belakang pemisahan diri MILF adalah membentuk sebuah negara merdeka Bangsa Moro berlandaskan iman Islam (Fellman 2011). Tujuan utama ASG kemudian berubah-ubah seiring dengan perjalanan kelompok teror tersebut.

Abu Sayyaf yang secara bahasa berarti ‘pembawa pedang’ atau ‘ayah dari pedang’ tak lepas dari sosok guru dari Abdulrajak Janjalani selaku pendirinya (Wibisono 2016). Perjalanan kelompok Abu Sayyaf tersebut dimulai pula di bawah kepemimpinan Abdulrajak Janjalani. Ia merupakan tokoh pemimpin ASG yang pertama dan secara pribadi memiliki afiliasi dengan *Al-Qaeda* di bawah kepemimpinan Osama bin Laden. Oleh sebab itu catatan-catatan awal pergerakan ASG mirip dengan seruan Osama bin

Laden yang menyerukan untuk “*kill the Americans and their allies –civilians and military– [because it] is an individual duty for every Muslim who can do it in any country in which it is possible to do it*” (Ali 2007). Maksudnya ialah seruan untuk seluruh gerakan teroris berbasis keagamaan Islam untuk menyerang segala bentuk afiliasi Amerika Serikat dan sekutunya dalam pemaknaan luas termasuk pada nilai, agama, budaya, pengaruh, hingga pihak yang dianggap sebagai kaki tangan Amerika Serikat dan kekuatan barat. Dengan pengaruh ideologis tersebut Janjalani kembali ke Basilan dan memimpin pemberontakan dengan prinsip dasar pendirian negara Islam, menolak otonomi, menolak kemerdekaan, dan menolak revolusi (Fellman 2011).

Paling tidak terdapat tiga fase perkembangan kelompok ASG. Pada fase awal kelompok ASG instrumen utama yang digunakan oleh kelompok ASG ialah pengeboman yang menasar penduduk sipil beragama Kristen atau Katolik yang dianggap selain sebagai penjajah bagi entitas dan wilayah Bangsamoro. Dari sini fase awal ASG merupakan kelompok terorisme religius dengan corak jihadis Al-Qaeda dengan agenda utama separatisme negara Islam (Fellman 2011). Namun demikian agenda tersebut terhenti pasca wafatnya Janjalani, kelompok ASG kemudian terpecah menjadi dua basis yaitu Basilan sebagai basis Khadaffi Janjalani yang merupakan adik Abdulrajak dengan ideologi dan rekam jejak pendidikan yang sama dan kelompok Sulu yang dipimpin Galib Andang atau dikenal sebagai Commander Robot. Keduanya melahirkan instrumen baru ASG yang berbeda dengan fase awal. Pada fase ini kelompok Sulu bertransformasi sebagai kelompok kriminal sebagaimana pendapat Cronin, penculikan-penculikan dan permintaan tebusan mulai terjadi pada masa ini, tak kurang dari 140 orang menjadi korban penculikan sepanjang 2000-2001. Aksi kriminal tersebut berlangsung hingga tertangkapnya Galib Andang. Kekuatan ASG Basilan kembali pada identifikasi tinggi menurut Vittori, misalnya dengan pengeboman Bandara Davao yang menewaskan 48 orang dan korban luka sebanyak 116 orang. Namun demikian, posisi ASG sebagai kekuatan kapasitas tinggi seperti fase pertama kembali berakhir dengan operasi militer gabungan Amerika Serikat dan Filipina yang menewaskan Khadaffi Janjalani (Fellman 2011).

Pada fase berikutnya sampai dengan tahun 2017, ASG dipimpin oleh Isnilon Totoni Hapilon yang juga merupakan pimpinan Islamic State cabang Filipina, oleh sebab itu modus operandi kelompok ini memiliki kemiripan dengan kelompok Islamic State. Kelompok ini juga menguasai sejumlah wilayah di gugus pulau paling selatan Filipina yaitu Basilan dan Sulu dan kerap kali menjalankan pembunuhan sandera dengan pemenggalan atau penggorokan. Analisis utama penculikan warga negara asing oleh kelompok ini adalah adanya pola tuntutan *ransom* (pemerasan atau tebusan) agar para tahanan dibebaskan. Seluruh korban pemenggalan oleh kelompok ini terjadi saat habis tenggat waktu permintaan uang tebusan. Pada tahun 2016 ASG menahan tak kurang dari 22 tawanan warga negara asing (Panes 2016). Penculikan yang dilakukan ASG memiliki sebuah pola kepentingan ekonomi yang melatar belakangi aksinya, yaitu sebagai wadah mencari keuntungan materiil. Dengan kata lain telah bertransformasi menjadi sebuah kelompok kriminal dengan modus operandi penculikan dan permintaan tebusan (Fellman 2011; Cronin 2006). Contohnya ASG membebaskan seorang warga negara Norwegia dan Filipina dengan tebusan sebesar 360.000 Dollar Amerika, untuk dua nyawa dari sekian banyak nyawa tawanan kelompok ini.

Kontrol ASG atas sebagian wilayah di Sulu dan Basilan juga mendatangkan pemasukan pajak dari masyarakat sebagai jaminan keselamatan termasuk juga dari perkembangan perdagangan ganja di kepulauan Sulu. Dengan sumber pendanaan tersebut ASG dapat

menjalankan operasinya pada tak kurang dari 22 kota di seluruh Filipina. Menurut analisis lembaga analisis yang berbasis di Kanada tersebut ASG dinyatakan sudah cukup mandiri dalam pendanaan. Oleh sebab itu analisis Vittori tentang pendanaan dan relasinya dengan kekuatan bertahan kelompok teror dapat menggambarkan kekuatan finansial dan sumber daya pendanaan ASG sekarang cukup untuk terus dapat mempertahankan keberadaan kelompoknya. Berdasar analisis tersebut, maka tindakan penculikan yang dijalankan oleh ASG adalah jalan agar ASG dapat terus bertahan, menculik selain secara oportunistik untuk mencari keuntungan namun juga untuk kepentingan bertahan hidup.

Penulis memiliki kecenderungan untuk tidak memilih antara kedua konsep ideologis yang menurut Cronin terjadi perubahan, dari tujuan ideologis menjadi tujuan kriminal-profit. Sebab keduanya memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dalam kasus Filipina. Sebagaimana telah dijelaskan pada awal penelitian ini bahwa latar belakang kemunculan gerakan terorisme di Filipina Selatan adalah usaha kebangsaan Bangsamoro yang juga beragama Islam untuk merdeka dari apa yang diklaim sebagai penjajahan Filipina. Oleh sebab itu, faktor ideologis biar bagaimanapun tidak dapat dilepaskan dari usaha ASG dalam mencapai tujuannya, yaitu tujuan ideologis ataupun tujuan keuntungan. Dalam analisis Phillips (2011), posisi dukungan *grass-root* yang kuat memainkan peranan dalam usia kelompok teror, dukungan *grass-root* pula amat berhubungan dengan kekuatan finansial lebih lagi basis rekrutmen. Faktor ideologis penting dalam usaha mempertahankan dukungan *grass-root* sebagaimana *nature* konflik Bangsamoro di Filipina. Contoh lainnya adalah kelompok ASG terus melakukan ancaman terorisme dan serangan teror yang terukur sehingga tidak menyebabkan eskalasi serangan pemerintah untuk mempertahankan *status quo martial law* yang diberlakukan Duterte. Masalah ekonomi dan isolasi yang terjadi membuka beberapa opsi bagi *grass-root*, yaitu menjadi radikal karena berbagai persoalan sosial (berupa pengangguran, ekonomi, dan kohesi sosial), atau mendukung ASG dan kelompok teror dengan tidak melaporkannya pada keamanan untuk menjamin keselamatan diri, mendukung ASG karena keterpaksaan demi keselamatan dan kelancaran usaha di wilayah yang dikuasai ASG, atau justru bergabung dengan ASG yang menawarkan keuntungan finansial. Berdasar argumentasi ini maka jelas bahwa motif ideologis dan motif keuntungan tidak dapat dipisahkan ketika membahas ASG.

Potensi Dampak BARRM bagi ASG

Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao telah memasuki empat bulan pertama berjalan sejak hasil referendum awal tahun 2019. Wilayah Filipina Selatan termasuk posisi kelompok Abu Sayyaf di Sulu dan Basilan secara yuridis berada dalam kawasan BARRM. Terdapat beberapa poin utama perubahan yang terjadi atau akan terjadi setelah terbentuknya dan efektif bekerja BARRM beserta perangkatnya. Dalam sebuah sesi tanya jawab terhadap Bangsamoro Transition Commission yang dirilis oleh Institute for Autonomy and Governance (2018) terdapat beberapa poin utama gambaran arah BARRM khususnya yang berkaitan dengan usaha menciptakan perdamaian di kawasan dari ancaman terorisme. Di antaranya adalah posisi pemerintahan transisi BARRM nantinya akan mengusahakan langkah berupa pendekatan politik, kultural, sosial-ekonomi, menegakkan keadilan, membentuk pemerintahan yang transparan (*good governance*), sedangkan hal-hal yang berhubungan dengan keamanan nasional tetap merujuk pada kebijakan pemerintah pusat. Kemudian identitas Bangsamoro

akan menjadi identitas yang diakui sebagai bagian integral dari identitas kebangsaan Filipina, hal ini dianggap penting sebagai usaha menyelesaikan konflik dari akar permasalahan. Sedangkan posisi angkatan bersenjata akan disesuaikan dengan kebijakan keamanan nasional pemerintah pusat dan stabilitas keamanan akan diserahkan pada Philippines National Police yang akan membuka kantor mengikuti kedudukan pemerintahan BARMM. Berdasarkan poin utama tersebut kita dapat menganalisis bahwa BARMM berusaha membangun wilayah Filipina Setelah pasca konflik dengan pendekatan *soft approach*, bahkan secara keamanan dari ancaman terorisme mengarah pada penegakan hukum alih-alih pendekatan militer.

Komponen berpengaruh lain dalam keberadaan BARMM adalah komposisi Bangsamoro Transition Authority (BTA). Jelas bahwa BARMM merupakan hasil kerja negosiasi MILF dan MNLF, kedua kelompok terbesar gerakan Bangsamoro di Filipina. Oleh sebab itu otoritas yang membidani terbentuknya pemerintahan daerah Muslim Mindanao didominasi dua kelompok tersebut. Dari seluruh 75 anggota otoritas tersebut 9 orang di antaranya merupakan nominasi MNLF, 26 nominasi pemerintah Filipina, dan sisanya merupakan nominasi MILF dengan keseluruhan hanya 12 orang nominasi perempuan. Latar belakang daerah asal para anggota BTA adalah asli dari Filipina Selatan dan berbagai latar belakang profesi baik kalangan terpelajar akademisi, pimpinan kombatan, usahawan, pengacara, dokter, pegawai pemerintah ARMM, dan tetap didominasi afiliasi kelompok MNLF (Ranada dan Tomacruz 2019). Sekalipun seluruh anggota BTA merupakan orang yang asli berasal dari kawasan Filipina Selatan, namun komposisi tersebut menggambarkan tantangan dari cita-cita terbentuknya BARMM sebagaimana dijelaskan sebelumnya sebagai sebuah badan yang berusaha mengonstruksi kohesi sosial, tak dapat dipungkiri faksi-faksi kepentingan dan lebih lagi kelompok teror di Filipina begitu variatif. Ide kohesi sosial ini mentah dan gagal dengan kenyataan penolakan pemerintah Filipina dalam bernegosiasi dengan kelompok apapun selain MILF dan MNLF, artinya ASG tidak akan menjadi bagian dari kohesi sosial atau lebih jauh lagi jalan negosiasi politik ini. Dari sudut pandang ini sekali lagi tampaknya ASG tidak akan bubar dan berakhir disebabkan oleh proses negosiasi politik. Artinya argumentasi bahwa kelompok teror ASG akan tertarik memasuki dunia politik dengan adanya pembagian otonomi keuangan sebesar 75% pada BARMM kemungkinan besar tidak terjadi disebabkan oleh kanal negosiasi politik yang sejak awal telah ditutup.

Dari potensi yang telah dipaparkan di atas potensi ancaman bagi ASG tersisa pada peranan Philippine National Police (PNP) yang lebih diutamakan untuk stabilitas keamanan kawasan, demikian pula dengan kombatan MILF dan MNLF yang bersedia untuk menurunkan senjata dan kembali menjadi bagian integral masyarakat. Keduanya sejalan dengan analisis Phillips tentang dukungan akar rumput, ketika kelompok-kelompok milisi yang ada mulai menurunkan senjata dan keberadaan institusi penegak hukum diperkuat dan menjadi tonggak utama alat pemerintah maka secara logis konflik di kawasan akan semakin berkurang dengan berkurangnya kelompok milisi dan juga sistem penegakan hukum yang diutamakan. Bila posisi PNP dan pemerintahan BARMM berhasil merebut hati publik dengan menghadirkan keamanan dan deeskalasi konflik yang nyata maka amat mungkin dukungan akar rumput menguat pada institusi BARMM yang jelas-jelas juga merupakan komitmen awal hasil referendum. Dengan demikian posisi ASG akan sedikit demi sedikit kehilangan dukungan akar rumput dengan deeskalasi konflik, hadirnya keamanan lewat penegakan hukum, tercipta keadilan, dan kesejahteraan dari *good governance*

dan otonomi keuangan. Tentu dengan catatan seluruhnya berjalan sesuai dengan yang dibayangkan dalam argumentasi di atas. Susunan premis argumentasi tersebut juga didukung oleh analisis Harmon (2010) yang menyebutkan bahwa kelompok teror dengan umur lebih dari 15 tahun cenderung dikalahkan melalui kebijakan penegakan hukum oleh kepolisian dan oleh kebijakan pemerintah yang baik serta menyelesaikan masalah akar rumput. Sekali lagi bila seluruhnya berjalan dengan baik melalui fungsi sentral *good governance* BARMM maka bubarnya ASG dapat diprediksi semakin dekat seiring dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, kohesi sosial, politik, dan seluruh aspek kehidupan masyarakat di kawasan BARMM.

Sayangnya kelompok teror seperti ASG tidak tinggal diam atas potensi ancaman-ancaman semacam itu. Pertama-tama ASG tidak tampak memiliki ketertarikan untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah dalam konteks BARMM. ASG tetap memainkan isu penjajahan oleh pemerintah Filipina dalam otonomi khusus yang dijanjikan oleh referendum dan terbentuknya BARMM. Isu tersebut diperparah dengan penyebaran isu pelanggaran hak asasi manusia dan pembunuhan warga sipil yang dilakukan oleh pemerintah Filipina. Berbagai kelompok termasuk juga ASG melakukan serangkaian serangan sebelum dan sesudah referendum sebagai simbol komitmen pada instabilitas kawasan (Abuza 2019). Sekali lagi ketika dihadapkan pada kondisi semacam ini *game theory* yang digunakan dalam analisis Harmon menggambarkan posisi *gambling* yang dihadapkan pada pemerintah, luaran dari kebijakan ekonomi, politik, kohesi sosial, dan sebagainya yang digadang-gadang BARMM pada akhirnya harus berhadapan dengan kekuatan kelompok teror ASG dalam meradikalisasi populasi. Tentunya kunci bagi otoritas BARMM adalah menciptakan dasar *good governance* yang ajek untuk dapat masuk pada tahap melawan kelompok teror melalui kebijakannya.

Untuk memberikan prediksi yang lebih terukur penelitian ini juga akan menggunakan indikator yang telah ditetapkan oleh Cronin tentang bubarnya kelompok teror. Tabel yang telah dipaparkan Cronin tersebut secara kualitatif akan menggambarkan dampak BARMM mana yang memiliki *feasibility* paling tinggi.

Tabel II
Intervensi Eksternal dan Kegagalan Internal: Analisis ASG

Fenomena	Dampak BARMM
Penangkapan/pembunuhan pimpinan kelompok	Dapat dilakukan dengan syarat penguasaan wilayah dan operasi intelijen PNP. ASG memiliki catatan mampu regenerasi.
Tekanan otoritas pemerintah	Hanya bila BARMM dan otoritas PNP dapat menjangkau seluruh wilayah Filipina Selatan (kepulauan)
Meninggalkan terorisme dan memilih taktik lain	ASG dan sebaliknya otoritas Filipina tidak bernegosiasi satu dengan lainnya. Opsi politik tidak mungkin.
Merger dengan kelompok teror lain	Mungkin, seperti yang terjadi saat pendudukan Marawi (ISIS Filipina).
Keberhasilan mencapai tujuan terorisme	Tujuan ASG adalah kriminalitas-keuntungan finansial yang jelas-jelas bukan merupakan tujuan temporer dan tidak dapat diterima oleh otoritas Filipina.

*Abu Sayyaf Group in Southern Philippines after
Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao*

Kehilangan dukungan publik	Mungkin, bila program dan target good governance, ekonomi, politik, kohesi sosial BARMM lebih kuat ketimbang propaganda ASG. Game theory perlu jadi perhatian pemerintah untuk tarik ulur eskalasi konflik.
Konflik internal ideologi dan kekuasaan	Konflik kepentingan (fase kedua ASG) terbukti tidak berujung pada bubarnya ASG, regenerasi kepemimpinan (karena analisis kebutuhan dan keuntungan yang didapatkan) menjadi catatan tersendiri. Ideologi hanya faktor penggalang dukungan. Membuka ruang bagi peran intelijen.
Kehilangan dukungan negara bagi <i>state-supported</i>	ASG bukan kelompok teror yang disponsori negara. Bahkan negara tetangga Malaysia dan Indonesia memiliki kepentingan mengalahkannya ASG.
Kegagalan regenerasi kelompok teror	Membuka peran intelijen. Fase kedua ASG membuktikan kelompok ini dapat meregenerasi baik kepemimpinan maupun basis dukungan.
Kelompok teror memilih metode kekerasan lain	Penculikan sudah cukup menguntungkan untuk mencapai tujuan keuntungan finansial.

Sumber: Cronin 2006.

Kompilasi analisis kualitatif berdasar penjelasan dalam penelitian ini.

Data dalam Tabel II dapat kita bandingkan dengan argumentasi Cronin yang dikembangkan secara kuantitatif oleh Weinberg dan Perlinger pada Tabel I. Perbandingan antar keduanya akan menggambarkan potensi dampak BARMM mana yang paling tinggi dan mana yang paling rendah dapat berdampak pada potensi bubarnya kelompok teror ASG. Dalam diinventarisir empat analisis potensi bubarnya kelompok ASG atas pengaruh eksternal kelompok teror (1) pembunuhan atau penangkapan pemimpin ASG. Secara teoretis Cronin dan analisis Weinberg dan Perlinger menyebutkan strategi ini menjadi alasan terbesar bubarnya kelompok teror. Dalam kasus ASG strategi ini akan menghadapi tantangan kemampuan regenerasi yang terjadi pada fase pertama (Abdulajak Janjalani), fase kedua (faksi Sulu dan faksi Basilan), fase tiga (Isnilon Hapilon). (2) Tekanan otoritas pemerintah. Strategi ini adalah yang paling mungkin dan berdampak pada bubarnya kelompok ASG, yaitu penguasaan wilayah dengan penegakan hukum dan aparat keamanan. Dengan kehilangan kantung *lawless* seluruh kelompok kriminal akan kehilangan basis pertahanan dan persembunyian. Tantangan strategi ini tentu saja adalah menyiapkan perangkat kohesi dan dukungan akar rumput sebelum penguasaan seluruh wilayah. (3) Potensi negosiasi politik dan dorongan ekonomi 75% masuk pada daerah otonom dengan menjadi pimpinan BARMM yang sudah didominasi MILF dan MNLF bukanlah opsi bagi ASG. (4) Kehilangan dukungan publik. Strategi ini sekali hanya dapat terlaksana dengan penguasaan wilayah dan terciptanya *good governance* BARMM.

Sedangkan terdapat enam analisis potensi yang dipengaruhi faktor internal kelompok teror. Di antaranya (1) merger dengan kelompok lain. Sekalipun kasus semacam ini pernah terjadi dalam kasus Marawi secara teoretis membubarkan kelompok

ASG namun tidak menghilangkan *nature* ancumannya. (2) Keberhasilan mencapai tujuan. Tujuan kriminal dan keuntungan finansial bukan merupakan tujuan yang memiliki konsep akhir. (3) Konflik ideologis internal. Gambaran ASG yang ideologis tidaklah sepenuhnya benar sebagaimana telah dijelaskan dalam *shifting* kepentingan ASG, sehingga ideologi tidak lagi menjadi persoalan utama dalam internal ASG. (4) Kehilangan dukungan *state-sponsored*. Posisi ini jelas tidak relevan dalam konteks ASG. Kelompok ASG sesuai analisis penelitian ini dapat mandiri secara finansial. Namun demikian konsep ini dapat dibalik menjadi mendapat dukungan usaha mengalahkan ASG dari pemerintah Malaysia dan Indonesia yang berkepentingan. Namun demikian konsep bantuan luar negeri lagi-lagi akan dihadapkan pada perdebatan kedaulatan, atau bahkan konflik internal kelompok seperti diketahui bahwa kelompok besar MNLF akar historisnya memiliki konflik dengan Malaysia, khususnya kawasan Sabah dan Sarawak. (5) Kegagalan regenerasi. Sayangnya ASG terbukti bertahan dengan regenerasinya. Strategi ini membuka peranan intelijen dan sekali lagi otoritas BARMM untuk merebut hati publik melalui programnya. (6) Terakhir, tidak ada analisis yang menunjukkan bahwa ASG akan memasuki fase lain setelah berbasis serangan bom (aliran Al-Qaeda) dan penculikan (aliran kriminal).

Namun demikian, hal yang telah dipaparkan di atas adalah analisis teoretis yang dipadukan dalam analisis strategik berdasarkan data yang dapat diakses, minus perkembangan BARMM terkini. Sayangnya BARMM sebagaimana pendahulunya ARMM dan proses perdamaian yang telah digagas pemerintah Filipina sejak lama memiliki catatan kegagalan yang tidak sedikit, sekalipun kali ini posisi BARMM mendapatkan dukungan dari dua faksi gerakan Bangsamoro terbesar dan terlama di Filipina. Terdapat tantangan-tantangan yang bahkan bersifat prinsip pada keberhasilan BARMM dalam mengeksekusi seluruh analisis di atas secara praktis di lapangan. Yang pertama adalah varian kelompok Bangsamoro seperti MILF dan MNLF yang sejatinya terdapat rivalitas yang berakar panjang sejak awal masa pergerakan kedua kelompok antara pimpinan MILF dan BTA Haji Murad Ebrahim dengan pimpinan MNLF Nur Misuari yang juga pernah mengepalai ARMM. Kedua adalah tantangan ekonomi yang tidak sederhana kawasan yang kini disebut sebagai BARMM secara ekonomi 66,3% keluarga berada di bawah angka kemiskinan nasional dan merupakan kawasan paling miskin di Filipina, belum lagi ditambah luasnya kawasan BARMM. Terakhir pemerintahan Filipina sebagai negara demokratis sayangnya menghadapi tantangan dukungan pemerintah pusat (konsep sentralisasi desentralisasi). Banyak kebijakan terkait dengan kawasan BARMM yang berhenti dan tidak segera terselesaikan pada tingkat nasional yang memerlukan konsultasi dan persetujuan kamar legislatif (Cook 2018). Artinya potensi BARMM untuk membentuk *good governance* bukanlah cita-cita yang sederhana. Oleh karena itu, dampak logis dari tidak tercapainya cita-cita BARMM adalah tetap kuat dan berkembangnya kelompok teror seperti ASG.

Simpulan

Prediksi bubarnya Abu Sayyaf Group dan hubungannya dengan dampak keberadaan Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao mesti memenuhi beberapa prasyarat prinsip. Di antara prasyarat yang secara keseluruhan harus dipenuhi adalah penguasaan wilayah Filipina Selatan termasuk kepulauan Tawi-tawi, Sulu, dan Basilan sebagai basis kelompok Abu Sayyaf adalah suatu keharusan. Penguasaan wilayah atau kontrol atas kawasan tersebut sesuai dengan amanat Bangsamoro Organic Law (BOL)

adalah tanggung jawab Philippines National Police (PNP). Artinya jalan penegakan hukum dan usaha menghadirkan keamanan bagi masyarakat adalah instrumen utama yang dapat ditempuh untuk melemahkan kelompok Abu Sayyaf. Strategi ini adalah pelemahan kelompok Abu Sayyaf Group dengan menghilangkan ruang gerak dan persembunyian, dengan menghilangkan kebutuhan dasar kelompok ini akan instabilitas kawasan secara teoretis dan praktis berdampak logis pada melemah bahkan bubarnya Abu Sayyaf Group.

Penguatan kontrol, penegakan hukum, dan menghadirkan keamanan tidaklah cukup dalam melemahkan atau bahkan mengalahkan Abu Sayyaf Group. Abu Sayyaf Group telah diketahui memiliki kemampuan regenerasi kepemimpinan yang tinggi sehingga dapat bertahan sejak kemunculannya pertama kali di bawah kepemimpinan Abulrajak Janjalani hingga hari ini, demikian pula dukungan *grass-root* yang didasari oleh keterpaksaan dan ketakutan yang diciptakan. Kita juga telah mengetahui bahwa kelompok Abu Sayyaf sekalipun mandiri dalam pendanaan dan sumber daya amat bergantung secara finansial pada modus operasinya berupa penculikan dan permintaan uang tebusan. Latar belakang persoalan ekonomi yang bermuara pada kebutuhan mencukupi secara finansial membuat kelompok ASG terus tumbuh dan mendapat dukungan akar rumput yang memilih jalan teror dan penculikan sebagai usaha menyambung hidup mengantarkan kita pada strategi yang berikutnya akan dijalankan oleh otoritas BARMM. Yaitu membangun kohesi sosial dan perbaikan ekonomi melalui otonomi 75% pemasukan daerah, pendidikan, pendekatan kultural, kontra radikalisme-propaganda. Dengan di taskannya kemiskinan di kawasan Filipina Selatan secara logis aksi kriminal penculikan seperti yang dilakukan ASG untuk keuntungan finansial tidak perlu dilakukan lagi, oleh karenanya kelompok ASG akan melemah dan kemudian bubar.

Dengan adanya dua *grand strategy* yang disandarkan pada tanggung jawab BARMM tersebut sepatutnya kelompok ASG dapat dilemahkan. *Grand strategy* yang pertama adalah strategi kontrol, penegakan hukum, dan stabilitas. Sedangkan *grand strategy* kedua ialah membangun ekonomi, kohesi sosial, dan kontra radikalisasi-propaganda. Kedua strategi utama tersebut secara teoretis dapat mengalahkan Abu Sayyaf Group, tentunya dengan syarat benar-benar berjalan dan didasarkan pada prinsip *good governance* yang terhindar dari korupsi dan *abuse of power* pada kepentingan golongan. Sayangnya justru posisi inilah yang menjadi tantangan bagi bertahannya BARMM sebagai usaha yang digadang-gadang membawa perdamaian.

BARMM jelas akan menghadapi dua tantangan besar yang mengakar jauh sebelum BARMM dibentuk berdasarkan keputusan referendum 2019. Pertama ialah masalah ekonomi yang amat pelik, kawasan Mindanao merupakan kawasan yang luas dengan kondisi ekonomi paling buruk di Filipina, lebih dari setengah populasi keluarga di kawasan tersebut ada di bawah angka kemiskinan nasional. Tantangan ekonomi ini adalah tantangan bagi *grand strategy* kedua untuk membangun kohesi sosial dan ekonomi. Belum lagi tantangan ini diperberat dengan komposisi kepemimpinan otoritas BARMM yang didominasi kelompok MILF pimpinan Haji Murad Ebrahim dengan minoritas kelompok MNLF pimpinan Nur Misuari. Dari gambaran komposisi tersebut, proses kohesi sosial antara dua kelompok besar yang memiliki sejarah konflik tersebut sukar untuk menemukan jalan terang. Terakhir adalah tantangan dukungan penuh pemerintah pusat terhadap pembangunan dan kebijakan otoritas BARMM, bila proses pengambilan keputusan mandek pada tingkat nasional dengan lobi dan negosiasi kamar eksekutif dan kamar legislatif yang berkepanjangan maka posisi

pengambilan kebijakan strategis praktis BARMM di lapangan akan terganggu, hal ini menjadi tantangan pada *grand strategy* pertama. Kedua tantangan besar tersebut bila berhasil diatasi maka kelompok ASG akan seiring berjalannya waktu, terciptanya pembangunan serta pemerataan ekonomi, terbentuknya kohesi sosial, dan terjaminnya stabilitas keamanan akan bubar dan terkalahkan oleh kebijakan penegakan hukum dan penyelesaian masalah pada akar rumput. Namun demikian, bila kedua tantangan tersebut menjadi jalan buntu bagi BARMM maka *status quo* konflik dan instabilitas akan tetap menjadi ruang bergerak dan berkembang tidak hanya kelompok teror Abu Sayyaf Group.

Referensi

Buku dan Bab dalam Buku

- Jones, S. G., dan M. C. Libicki, 2008. *How terrorist groups end: Lessons for countering al Qaeda* (Vol. 741). Pittsburgh: Rand Corporation.
- Schmid, A. P. (ed.), 2011. *The Routledge handbook of terrorism research*. New York: Taylor & Francis.
- Panes, Vanessa, 2016. "The Influence of Daesh in the Philippines", dalam Gorawantschy, Beatrice, et al. (ed.), *Panorama Insights into Asian and European Affairs: Countering Daesh Extremism Europe and Asian Responses*. Singapore: Konrad-Adenauer-Stiftung Ltd.

Jurnal dan Jurnal Daring

- Adam, J., 2018. "Bringing Grievances Back In: Towards an Alternative Understanding of the Rise of the Moro Islamic Liberation Front in the Philippines", *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, **174**(1): 1-23.
- Ali, F., 2007. "Rethinking US Counter-Terrorism Strategies: A Muslim Perspective", *Journal of Policing, Intelligence and Counter Terrorism*, **2**(2): 30-47.
- Cook, M., 2018. "Three Challenges Facing the Bangsamoro Organic Law", *ISEAS Perspective*, **82**: 1-9.
- Cronin, A.K., 2006. "How al-Qaida ends: The decline and demise of terrorist groups", *International Security*, **31**(1): 7-48.
- Harmon, C. C., 2010. "How Terrorist Groups End: Studies of the Twentieth Century", *Strategic Studies Quarterly*, **4**(3): 43-84.
- Phillips, P. J., 2011. "The life cycle of terrorist organizations", *International Advances in Economic Research*, **17**(4): 369-385.

- Vittori, J., 2009. "All struggles must end: The longevity of terrorist groups", *Contemporary Security Policy*, **30**(3): 444-466.
- Weinberg, L. dan Perliger, A., 2010. "How Terrorist Groups End", *CTC Sentinel*, **3**(2): 16-18.
- Wibisono, A.N., 2016. "Kelompok Abu Sayyaf dan Radikalisme di Filipina Selatan: Analisis Organisasi Terorisme Asia Tenggara", *Ilmu Ushuluddin*, **3**(1): 119-132.

Artikel Daring

- Abuza, Zachary, 2019. "Bangsamoro After the Plebiscite" [daring]. dalam <https://www.policyforum.net/bangsamoro-after-the-plebiscite/> [diakses pada 12 Oktober 2019].
- Petty, Martin, 2019. "Philippine Referendum Returns Big "Yes" Vote on Bangsamoro Self-rule", *Reuters*, 26 Januari, [daring]. dalam <https://www.reuters.com/article/us-philippines-politics-autonomy/philippine-referendum-returns-big-yes-vote-on-bangsamoro-self-rule-idUSKCN1PK068> [diakses pada 12 Oktober 2019].
- Ranada, Pia dan Sofia Tomacruz, 2019. "Who's Who in the Bangsamoro Transition Authority", *Rappler*, 29 Maret, [daring]. dalam <https://www.rappler.com/newsbreak/iq/226874-composition-bangsamoro-transition-authority> [diakses pada 28 Mei 2019].
- Wersch, Patrick van, 2019. "Will Mindanao Referendum Bring Peace to Philippines Restive Region?", *DW*, 5 Februari, [daring]. dalam <https://www.dw.com/en/will-mindanao-referendum-bring-peace-to-philippines-restive-region/a-47364839> [diakses pada 20 April 2019]

Lain-Lain

- 2017-2022 National Security Policy for Change and Well-being of Filipino People, 2017. Manila: The Government of the Republic of the Philippines.
- Counter-extremism Project, 2019. "The Philippines: Extremism & Counter-Extremism". [daring] dalam <https://www.counterextremism.com/countries/philippines> [diakses pada 12 Oktober 2019].
- Fellman, Z., 2011. *Abu Sayyaf Group*. Washington DC: Center for Strategic and International Studies.
- Institute for Autonomy and Governance, 2018." Q and A on The Bangsamoro Organic Law". [daring] dalam <http://iag.org.ph/index.php/news/181-q-and-a-on-the-bangsamoro-organic-law> [diakses pada 12 Oktober 2019].